



VOL.11 No. 1 APRIL - SEPTEMBER 2014

ISSN 1693-9204

# Visi Publik

*Jurnal Ilmu Administrasi Publik*

DISOREINTASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH  
KEPULAUAN DI PROPINSI BANGKABELITUNG

PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN  
MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NON  
STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
PERBALINGGA

KEGAGALAN IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI  
ENERGI BERBASIS SINGKONG DI DESA RANDEGAN  
KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUWANG

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DAN SIMPAN PINJAM  
PEREMPUAN (SPP) PNPB-MPU DI KECAMATAN  
KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUWANG

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS  
PENERIMAAN PAJAK BUMIHANDANGUNAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN

ANALISIS KUALITAS SITUS WEB PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PELAYANAN PUBLIK

PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS  
PEMETAAN POTENSI SISWA TERHADAP PRESTASI  
BELAJAR SISWA (Studi di Sekolah Dasar Kecamatan  
Karanganyar Kabupaten Purbalingga)

PENGGUNAAN "NAMATUA" DALAM MASYARAKAT DESA  
(Kajian Kebijakan Kependudukan Dari Perspektif Budaya)

ISSN 1693-9204



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
PURWOKERTO

# Visi Publik

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik

---

### SUSUNAN DEWAN REDAKSI

#### Penanggung Jawab :

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

#### Ketua Dewan Penyunting :

Dr. Muslih Faozanudin, M.Sc.

#### Sekretaris :

Drs. Simim, M.Si

#### Dewan Penyunting :

Prof. Dr. Jeremias T. Keban, M.U.R.P (UGM)

Prof. Dr. Eko Prasajo (UI)

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA (UI)

Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko (Unsoed)

Dr. Ali Rokhman (Unsoed)

Dr. Slamet Rosyadi (Unsoed)

#### Redaksi Pelaksana

Dr. Wahyuningrat, M.Si

#### Staf Redaksi :

Drs. Darmanto Sahat, M.Kes.M.Si.

Sri Maghrully Haryono, S.Tp.

Trisianto Pradita

#### Alamat Redaksi :

Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman  
Kampus Grendeng, JL. Prof. HR. Boenyamin 993 Purwokerto, 53122  
Telp (0281) 628034; 636992 Pes 106  
e-mail : [visipublik.unsoed@gmail.com](mailto:visipublik.unsoed@gmail.com)

Terbit pertama kali : April 2004

Frekuensi terbit : 2 kali setahun pada bulan April dan Oktober

# Visi Publik

## Jurnal Ilmu Administrasi Publik

### DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
DISOREINTASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN DI PROPINSI BANGKA BELITUNG <i>(Tobirin, Arfianto Purbolaksono, Juned)</i>	1-10
PENGARUH KEPEMIMPINAN, IKLIM ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NON STRUKTURAL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA <i>(Kustinah dan Pawrtha Dharma)</i>	11-19
KEGAGALAN IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI BERBASIS SINGKONG DI DESA RANDEGAN KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS <i>(Septian Muhranto)</i>	20-32
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI PROVINSI BANTEN <i>(Delly Maulana)</i>	33-43
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) DAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM-MPd DI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS <i>(Etjung Widhiarto, Dwiyanto Indiahono, dan Tobirin)</i>	44-52
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN <i>(Edy Suprayogi)</i>	53-60
ANALISIS KUALITAS SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DALAM PELAYANAN PUBLIK <i>(Heru Prayitno dan Paulus Israwan Setyoko)</i>	61-69
PENGARUH SISTEM PEMBELAJARAN BERBASIS PEMETAAN POTENSI SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA <i>(Studi di Sekolah Dasar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)</i> <i>(Agus Sinarto dan Swasta Dharma)</i>	70-78
PENGGUNAAN "NAMA TUA" DALAM MASYARAKAT DESA <i>(Kajian Kebijakan Kependudukan dari Perspektif Budaya)</i> <i>(Niken Paramarti Dasuki dan Sukarso)</i>	79-86

# DISOREINTASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN DI PROPINSI BANGKA BELITUNG

Oleh : Tobirin, Arfianto Purbolaksono dan Juned

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed dan Yayasan Lembaga Pengembangan  
Potensi dan Keswadayaan (BAHAD)

tobi.rifan@gmail.com; anto\_shevchenko@yahoo.com; junone@gmail.com

(Diterima: 15 Desember 2013, disetujui 25 Januari 2014)

## ABSTRACT

*Marine economic potential is enormous, but the level of welfare is still very low. Ironically poverty found in many areas of real islands have abundant potential resources. The root cause for this is a development approach that is still adopting continental paradigm. The purpose of this study was to find out the problems and strategies for solving problems of sustainability management archipelago area. The research is descriptive qualitative method, data collection using observation, in-depth interviews and focus group discussions with stakeholders, HNSI, the province of Bangka Belitung. Research results show Bangka Belitung Islands Province as one is still faced with the dynamics and problems of the islands. Aspects of natural resource management, environmental damage caused by illegal tin mining, the traditional fishermen who can not compete with foreign fishermen and outside the island, conflict management of coastal areas, and the spread of the islands led to the high cost of the aspects of education, health and public services, and the map of the area development areas between conservation areas and protected forests unclear. For that the islands should receive special attention from the central government, the need for regulation and management of development that is different from the mainland regions. Additionally supported by decentralized local financial system in favor of the claim that the islands should be implemented.*

**Keywords :** development, gaps, islands

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Oleh karenanya paradigma pembangunan yang digunakan seharusnya lebih mengedepankan pada pembangunan yang berorientasi pada wilayah perairan dan berbasis pada masyarakat daerah dan lokal

(Bengen, D.G, 2010 dan Santosa, 2012).

Namun yang terjadi sebaliknya, Indonesia lebih mengedepankan pembangunan yang berbasis pada wilayah daratan, hal ini dibuktikan dengan produk undang-undang yang mengatur tatakelola pembangunan di daerah lebih mengutamakan pembangunan di wilayah daratan.

Sebagai contohnya adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah tidak mengatur secara khusus tentang pembangunan wilayah kepulauan atau pesisir. Akibatnya pembangunan wilayah kepulauan atau pesisir di hadapkan pada permasalahan kesenjangan pembangunan yang terus meningkat. Masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya akses untuk peningkatan pendapatan, pencurian ikan, kerusakan biotic lingkungan laut, konflik pengelolaan wilayah pesisir oleh masyarakat maupun pemilik modal setiap saat mewarnai kehidupan masyarakat kepulauan. (Mawardi, 2009)

Gambaran permasalahan ini menjadi koreksi bersama untuk mendudukan wilayah kepulauan sebagai salah satu wilayah strategis yang perlu di taulang dengan baik. Melalui manajemen pembangunan yang berorientasi pada wilayah pesisir dan peraturan perundangan yang mendukung pada pengembangan pembangunan daerah kepulauan. Langkah awal adalah merubah mindset atau pola pikir bangsa Indonesia dalam memandang wilayah atau daerah kepulauan.

Artinya nilai strategis wilayah kepulauan tersebut harus didukung dengan kesadaran mengakui keunikan provinsi Kabupaten/kota yang berbasis pada wilayah kepulauan. Permasalahan wilayah ke-

pulauan bukan lagi wilayah propinsi kabupaten kota yang berbasis pada kepulauan. Melainkan menjadi permasalahan bersama apalagi menyangkut masalah kedaulatan dan sumberdaya laut yang memiliki makna strategis bagi keberlanjutan perekonomian di Indonesia (Bengen, 2010). Apabila selama ini wilayah lautan telah menyumbangkan hampir 20 % PDRB nasional dengan kondisi tatakeleola pembangunan kelautan yang terabaikan, maka ke depan wilayah kepulauan menjadi pengharapan bagi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Namun kesadaran ini setidaknya masih menjadi polarisasi dari wilayah Propinsi/kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir yang lebih luas. Seolah wilayah kepulauan menjadi permasalahan tujuh propinsi yang sedang memperjuangkan legitimasi propinsi kepulauan. Adapun Propinsi tersebut adalah 1) Nusa Tenggara Timur dengan memiliki luas lautan 88 %, 2) Nusa Tenggara Barat dengan luas lautan 85 %, 3) Kepulauan Riau dengan luas lautan 96 %, 4) Kepulauan Bangka Belitung dengan luas lautan 75,80 %, 5) Sulawesi Utara dengan luas lautan 78 %, 6) Sulawesi Utara dengan luas lautan 78,90 %, 7) Maluku Utara dengan luas lautan 90,80 %. (Ernas, 2012).

Setidaknya tujuh propinsi ini menjadi inspirasi untuk mendudukkan wilayah kepulauan menjadi wilayah strategis yang perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak. Hal ini menyangkut kedaulatan negara, keunikan yang khas yang berbeda dengan wilayah daratan, serta menjadi acuan dalam tatakelola pembangunan yang berbasis pada kepulauan secara cepat dan tepat.

Provinsi Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi yang berkarakteristik daerah kepulauan. Kondisinya, mencerminkan kondisi umum pengelolaan daerah kepulauan di Indonesia. Secara umum terdapat permasalahan yang harus dihadapi dalam pengelolaan wilayah kepulauan. Di era otonomi daerah, Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 sesungguhnya diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki serta menjaga kelestarian lingkungannya. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat menciptakan keadilan ekonomi dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pengaturan wewenang dan hubungan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam tata kelola sumber daya alam sektor

kelautan (wilayah pesisir dan laut), tidak sekedar difokuskan pada pengaturan terhadap objeknya saja (sumberdaya alam), tapi ditekankan pula kewajiban dan tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan ini yang diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan perbedaan persepsi antar pelaku pembangunan dan adanya tumpang tindih peraturan perundangan, terutama yang mengatur desentralisasi dan otonomi daerah dengan perundangan sektoral. Sementara itu, kewenangan yang telah di desentralisasikan kepada pemerintah daerah belum berjalan secara optimal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara

analitis kualitatif. Metode penelitian dititikberatkan pada evaluasi pembangunan daerah kepulauan. Hal ini akan dilakukan dengan menelusuri informasi dari berbagai sumber data yang terdiri atas informan dalam bidang ini, tempat dan peristiwa serta dokumentasi/ arsip terkait yang ada di Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu teknik pengumpulan data lainnya yang akan digunakan adalah *Focus Group Discussion* (FGD) atau diskusi kelompok terarah yang dilakukan oleh para informan secara kelompok, sementara peran peneliti hanya sebagai fasilitator selama diskusi berlangsung. Data akan dianalisis dengan teknik analisa model interaktif (Miles and Huberman, 1992). Dengan menggunakan teknik analisis tersebut kesimpulan telah teruji secara selektif dan akurat (Sugiyono, 2009: 204).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di wilayah propinsi kepulauan, adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah propinsi Bangka Belitung dengan wilayah Kabupaten/Kota Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung. Selain sebagai wilayah kepulauan dengan luas wilayah 75,80 %, Propinsi Bangka Belitung merupakan propinsi dengan potensi sumber daya laut

yang yang tinggi. Contohnya adalah Kabupaten Bangka Selatan memiliki potensi sumberdaya laut yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Potensi Sumberdaya kelautan dan perikanan bangka selatan sangat besar yaitu mencapai 1 juta ton/tahun (MSY) dengan nilai ekonomis mencapai lebih dari 1 trilyun rupiah/ tahun.

Potensi perikanan lahan budidaya tawar, payau dan laut adalah 20.000 ha. Demikian Halnya di Kabupaten Belitung dengan potensi perikanan yang cukup tinggi mencapai 2.450.344 ton pada tahun 2010 yang terdiri dari ikan dasar berupa Kakap Merah, Kerisi, Anjang-ANjang,, Kuwe, Bawal, Ekor Kuning, Manyung, Pari-Pari, Cumi-Cumi, Kerapu dan Alu-Alu, Sedangkan Ikan Pelagis terdiri dari Tenggiri, Tongkol, Kembung, Selar, Tembang, Banyir, Julung-Julung (Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan 2010).

Halnya Sub sector perikanan khususnya perikanan laut di Kabupaten Bangka sangat dominan mengingat pulau Bangka di keleilingi oleh lautan dan berbatasan dengan Laut Cina Selatan yang memiliki sumberdaya laut yang relative besar untuk dikembangkan. Komoditi yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti ikan keranu, Kakap Merah,

Udang, Cumi-Cumi, Sirip Ikan. Produksi ikan laut di Kabupaten Bangka pada tahun 2011 sebanyak 23.793 ton, tahun 2010 20.515,523 ton, sedangkan ikan tawar tahun 2011 tercatat 90.4419 ton.

Sumberdaya laut diwilayah kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang bernilai ekonomi tinggi, selain bidang perikanan terdapat potensi sumberdaya alam seperti berikut ini : 1) Vegetasi mangrove jenis *Rhizophora* dan *Avicennia sp*, 2) Hamparan padang lamun dan makro algae cukup tinggi, 3) Beberapa lokasi terdapat rataan karang, 4) Terdapat beberapa jenis ikan di sekitar perairan antara lain ikan kembung, bawal, layur, tenggiri dan pari, 5) Kondisi terumbu karang cukup baik, 6) Fishing ground area, rumput laut, 7) Energi gelombang cukup signifikan, berpeluang untuk pengembangan tenaga listrik energi gelombang, pengembangan tanaman kelapa .

Menurut (Victor PH Nikijuluw, 2008) dibalik potensi tersebut terdapat beberapa permasalahan, yang perlu diantisipasi terutama berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. ada beberapa catatan terutama berkaitan dengan hak pengusahaan perairan pesisir (HP3), adanya tambang timah illegal, belum terpetakannya potensi wilayah laut yang jelas antara batas penambangan, perikanan, nelayan kecil dan

besar serta dampak lingkungan yang cukup memprihatinkan.

Mengingat kondisi demikian penelitian ini melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang memiliki pemahaman dan pengetahuan di wilayah kepulauan. Khususnya pihak-pihak yang terkait yaitu Ketua DPRD Propinsi Bangka Belitung, DPRD Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, dan Belitung, DKP, HSNI, Akademisi, Nelayan dan masyarakat pada umumnya.

### **1. Identifikasi dan Perspektif Pembangunan Daerah Kepulauan**

Paradigma pembangunan Indonesia dihadapkan pada situasi biasanya orientasi darat daripada mensinergikan antara wilayah darat dan laut. Hal lain dari pembangunan seringkali memposisikan masyarakat daerah sebagai obyek bukan sebagai subyek (Handoko, 2013). Selain itu diperparah dengan strategi pembangunan yang digunakan adalah dengan model teknokratis yang menyebabkan terkonsentrasi pada wilayah daratan. Padahal faktanya Indonesia merupakan wilayah dengan kepulauan sebanyak 17.506 pulau-pulau besar dan kecil dengan garis pantai terpanjang ke dua di dunia, implikasinya adalah bangsa Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia (Oladipo, J. A., 2008). Namun kondisi ini kurang di sadari



oleh bangsa Indonesia akibatnya daerah kepulauan terabaikan dari aspek pembangunan dan pemerataan kesejahteraannya. Apalagi daerah kepulauan di wilayah terluar kurang mendapat sentuhan pembangunan, akibatnya timbul berbagai permasalahan di wilayah perbatasan. Kemiskinan, rendahnya pendidikan, batas wilayah yang tergadaikan, sampai semangat nasionalisme yang mulai pudar. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah Indonesia, berkaitan dengan wilayah kepulauannya, perlu ada tindakan sistematis dan strategis dengan dilandasi alasan yuridis yang kuat.

Selama ini Regulasi yang dibangun berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UU No. 32 Tahun 2004 dan Perpres No. 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau kecil Terluar belum menjamin keberlangsungan pembangunan wilayah kelautan.

Faktanya banyak permasalahan seperti yang telah disebutkan juga terdapat permasalahan berkaitan dengan HP3 (Hak Pengusahaan Peraian Pesisir). Pengaturan mengenai HP3 ini dianggap berpotensi mengancam kehidupan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, serta melanggar hak

masyarakat adat terkait dengan hak ulayat. Selain itu HP3 juga bertentangan dengan konstitusi, negara dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan dan kewenangannya dijalankan melalui lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah eksekutif atau pemerintah. Pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat dalam melaksanakan fungsinya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan kekayaan alam yang berada di wilayah hukum Indonesia, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan lain adalah berkaitan dengan sentralisasi pengelolaan laut dan kepulauan, serta komitmen pengembangan lembaga yang belum jelas menjadi warna krusial selain masalah nelayan tradisional dan nelayan asing, lingkungan dan berbagai masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan berbagai kebijakan yang interegatif. Perspektif permasalahan ini menjadi perhatian dalam kajian penelitian ini. Setidaknya penelitian ini memiliki komitmen untuk mencari jawaban berbagai permasalahan dengan studi kasus pembangunan di wilayah kepulauan. Khususnya di wilayah propinsi Bangka Belitung.

Propinsi yang memiliki geografis sebagai wilayah kepulauan selain menyimpan potensi kekayaan SDA yang

berlimpah berupa sumberdaya laut, tambang, rumput laut, wisata bahari dan perkebunan. Bangka Belitung juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan berkaitan dengan kehidupan nelayan tradisional yang terpinggirkan oleh system yang tidak memihak kepada kepentingan nelayan, tidak adanya zonasi wilayah laut yang menyebabkan tingginya permasalahan pengelolaan sumberdaya laut di wilayah Bangka Belitung.

Berbagai perspektif pembangunan wilayah kepulauan berdasarkan wawancara dari berbagai nasasumber, akademisi, HNSI, DPRD, aparat pemda, mahasiswa NGO. Di wilayah Bangka Belitung memiliki karakteirsitik wilayah kepulauan yang belum tergal dengan baik, optimalisasi sumberdaya laut yang tidak mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah sebagai sumber penghidupan masyarakat. Hal ini diakibatkan masih menjadi primadonya bahan tambang yaitu timah di wilayah pesisir, padahal masalah ini senantiasa menimbulkan problematikan lingkungan yang berkepanjangan bagi biota laut maupun wilayah daratan. Apalagi pertambangan timah ilegal yang tidak di atur dengan tegas berkibat pada permasalahan sistematik yang sulit terselasaikan. Belum lagi masalah nelayan tradisional yang dihadapkan pada aturan

yang belum jelas, belum adanya zonasi wilayah laut dan pertambangan mengakiatkan nelayan hanya menjadi penonton dalam menghidupi kehidupannya.

Sisi lain pemerintah daerah masih dihadapkan pada kemampuan SDM yang rendah serta masalah peta wilayah yang belum jelas. Terutama zona wilayah hutan lindung, konservasi mengakibatkan pemerintah daerah sulit untuk melakukan tindakan pengembangan wilayahnya. Oleh karenanya perlu ada aturan yang jelas demi kelancaran pembangunan di wilayah Bangka Belitung.

## 2. Isu Strategis Pembangunan Wilayah Kepulauan

Isu strategis permasalahan pembangunan di daerah kepulauan di beberapa Kabupaten di Propinsi Bangka Belitung dapat dikelompokan menjadi beberapa isu strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang perlu mendapat perhatian adalah ; a) Kualitas Sumber daya manusia kelautan dan perikanan baik nelayan, pembudidaya dan pengolah serta pemasar yang masih rendah. Peningkatan kualitas SDM ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. b) Produktivitas hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya yang masih rendah. c) Armada

penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal motor berukuran kecil sehingga berakibat jumlah hari layar menjadi terbatas. Peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan perlu dipacu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap. d) Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan untuk melakukan pengawasan kapal-kapal perikanan dan kegiatan ekonomi lainnya di lautan. Perlunya ditingkatkan jumlah sarana dan prasarana pengawasan sehingga pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat lebih optimal.

Masalah lain adalah 1) Maraknya penambangan timah ilegal di pesisir dan lautan berakibat penurunan kualitas ekosistem pesisir dan lautan. Perlunya peraturan perundangan yang lebih jelas untuk menghindari tumpang tindihnya kepentingan. 2) Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam proses pengolahan hasil perikanan. Produk hasil perikanan sebagian besar dijual dalam bentuk produk hulu dan proses pengolahan baru sebatas home industri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya jiwa kewirausahaan, kurangnya penguasaan teknologi dan minimnya peralatan pengolahan hasil perikanan. 3) Belum berjalannya penerapan standar nasional Indonesia dalam penerapan higiene dan

sanitasi proses pengolahan di unit pengolahan ikan (UPI). Hal ini disebabkan belum adanya UPI yang mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan. 4) Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil dalam kegiatan ekonomi. Banyaknya pulau-pulau kecil mengandung SDA yang sangat besar terutama kawasan pesisir dan Barang berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). 5) Terbatasnya sumber energi terutama listrik dan bahan bakar minyak mengakibatkan tingginya ongkos produksi perikanan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai pengembangan sumber energi alternatif yang dapat menunjang kegiatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan. (DKP Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012)

### 3. Strategi Pembangunan Daerah Kepulauan

Pendekatan pembangunan di wilayah yang berciri kontinental tidak dapat diseragamkan dengan pembangunan wilayah yang bertipologi gugusan pulau karena karakteristiknya yang berbeda. Wilayah kepulauan cenderung terisolasi, minim sumber daya, serta memiliki lingkungan yang peka. Namun di sisi yang lain perlu diakui setting pembangunan nasional dan daerah saat ini masih bias dengan kepentingan daratan, sehingga

kurang mengakomodasi kepentingan wilayah yang bertipologi kepulauan.

Untuk itu pertama kali yang dibutuhkan ialah perubahan paradigma dalam kebijakan pembangunan pada skala nasional dan daerah, dari *land-based development* menjadi *marine-based development*. Pembangunan daratan harus disinergikan dan diintegrasikan secara proporsional dengan pembangunan sosial ekonomi di laut. Perubahan paradigma pembangunan menuju *marine-based development* mendorong adanya perubahan dalam kultur serta etos hidup masyarakat, agar lebih berorientasi pada dunia kelautan, sebab disinilah letak kunci keberhasilan pembangunan daerah kepulauan (Ernas, 2012). Untuk itu, selain perlu kesadaran yang dalam, visi memandang yang tajam dalam menatap masa depan yang paling diperlukan adalah kemauan politik untuk memecahkan masalah-masalah ini secara fundamental. Kelenghan dalam mengantisipasi tuntutan kebutuhan masa mendatang sebagaimana telah dipaparkan, niscaya akan membawa efek berantai bagi pembangunan pada sektor lain, bahkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. Perubahan paradigma pembangunan menuju *marine-based development* harus tercermin dalam strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik

wilayah kepulauan. Pembangunan daerah kepulauan dapat dilihat dari berbagai segi.

## KESIMPULAN

Kondisi luas lautan dan tesebarnya pulau-pulau menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan pelayanan public kepada masyarakat. Selain itu tesebarnya pulau-pulau akan berakibat pada biaya tinggi dalam proses pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk itu Indonesia sebagai negara kepulauan harus mengakui keunikan propinsi/kabupaten/kota kepulauan. Konsekuensinya perlunya strategi dan metode yang berbeda dalam pembangunan daerah kepulauan. Daerah kepulauan harusnya memiliki wewenang dan kekuasaan yang terjabarkan dalam desentralisasi daerah berupa kewenangan khusus.

Hal ini akan menjadi jawaban permasalahan daerah kepulauan, khususnya propinsi Bangka Belitung sebagai salah satu propinsi kepulauan masih dihadapkan pada dinamika dan problematika daerah kepulauan. Aspek pengelolaan SDA, kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal, nelayan tradisional yang kalah bersaing dengan nelayan asing dan luar pulau, konflik pengelolaan wilayah

pesisir, dan terbanyak pulau-pulau yang menyebabkan biaya tinggi dari aspek pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik yang mendasar, selain itu peta wilayah pengembangan daerah yang dihadapkan pada wilayah konservasi dan hutan lindung harus diperjelas.

Untuk itu wilayah kepulauan harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, perlunya regulasi dan manajemen pembangunan yang berbeda dengan daerah daratan. Selain itu di dukung dengan

desentralisasi system keuangan daerah yang berpihak kepada daerah kepulauan menjadi tuntutan yang harus diimplementasikan. Wilayah strategis ini harus terjaga sebagai penjaga kedaulatan sekaligus potensi sumber kekayaan ekonomi yang tinggi sebagai alternatif sumber pendapatan nasional dari sector kelautan yang semakin penting.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bengen, D.G, 2010, Perspektif Strategi Pembangunan Negara Maritim Berbasis Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Seminar Nasional Indonesia Maritime Institute,
- BPS Provinsi Bangka Belitung, 2010
- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, 2012
- Ermas, Saidin, 2012, Pembangunan Daerah Kepulauan; Pengalaman Dari Maluku, Workshop Evaluasi Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah, DPD RI-Babad
- Handoko, Waluyo, Strategi Pengembangan Masyarakat (Comunity Development) Melalui program pengembangan Koperasi dan UMKM berbasis kearifan Lokal, JIPP, Jurnal Ilmu Politik dan pemerintahan Vol, 1, Nomor 2 Januari 2013, Unsil
- Mawardi, 2009, Mohammad Ikhwannudin, Membangun Daerah Yang Berkemajuan, Berkeadilan, dan Berkelanjutan, Bogor, IPB Press,
- Oladipo, J. A., 2008. "Project Planning and Implementation at The Local Government Level : Lesson of Experinece", *European Journal of Social Science*, Vol. 6, Number 4, pp.
- Santoso, Rahmat, 2012, Dari sentralistik ke Otonomi (kajian Sosiologis tentang Bangunan Paradigma Pembangunan Pasca Reformasi, Prosisidinf Seminar Nasional, FISIP Unsoed
- Sugiyono, 2009, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: CV. Alfabeta,
- Victor PH Nikijuluw, 2008, Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal, Jakarta, Cidesindo